

BAB II

Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century

Hubungan awal yang lemah antara Indonesia dan Korea Selatan dapat dianggap sebagai produk atau korban dari Perang Dingin.¹ Karena perbedaan ideologi yang dianut,² maka lebih dari 20 tahun sejak berakhirnya Perang Dunia ke-II, kedua negara bekas jajahan tersebut tidak dapat melakukan hubungan diplomatik bilateral. Namun, sejak dibukanya perwakilan konsuler pada akhir tahun 1966 dan perwakilan diplomatik pada akhir tahun 1973, hubungan antara kedua negara itu berkembang dengan sangat cepat, meluas sehingga meliputi berbagai bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan militer yang semakin erat.

Hubungan kenegaraan antara Indonesia dan Korea Selatan telah berjalan selama lebih dari empat dasawarsa sejak kedua negara tersebut menandatangani persetujuan pembukaan hubungan diplomatik kenegaraan tingkat konsuler pada 1966. Sebagai langkah pertama dimulainya hubungan kenegaraan resmi antara Indonesia-Korea, dalam hubungan diplomatik tingkat konsuler tersebut dibuka banyak kesempatan bagi kedua negara untuk bekerja sama di berbagai bidang demi tercapainya kepentingan kedua negara.³ Hubungan ekonomi merupakan salah satu hubungan yang peningkatannya banyak dipengaruhi oleh peningkatan hubungan bidang politik. Bersama dengan adanya peningkatan hubungan Indonesia-Korea di bidang politik, hubungan kerjasama ekonomi pun mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hubungan kerjasama ekonomi ini dimanfaatkan oleh kedua negara untuk saling mengisi satu sama lain, yaitu keunggulan Indonesia dalam hal sumber daya alam, tenaga kerja, serta pasar yang luas dan

¹ Yang Seung-Yoon, *Op.cit.*, hal. 1.

² Korea Selatan di bawah kepemimpinan Presiden Rhee Syngman dengan ideologi pro-Barat dan Indonesia yang dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno dengan ideologi anti-Barat.

³ *Hubungan Bilateral Indonesia Korea dan Pentingnya Studi Korea*, diunduh dari http://www.janabadra.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=108:hubungan-bilateral-indonesia-korea-dan-pentingnya-studi-korea&catid=43:berita-universitas diakses pada tanggal 5 November 2010 pada pukul 01.26 WIB.

aktif, dapat melengkapi keunggulan Korea dalam hal modal dan teknologi yang memadai, demikian juga sebaliknya.

Dalam proses selanjutnya, hubungan kedua negara di bidang kebudayaan muncul sebagai salah satu aspek dari hubungan bidang ekonomi dan politik. Sejalan dengan semakin banyaknya kalangan pebisnis dari kedua negara yang masuk ke wilayah negara lain, jumlah wisatawan dan kerjasama di bidang pariwisata pun meningkat. Banyaknya warga Korea yang tinggal di Indonesia dan warga Indonesia di Korea mendorong berjalannya proses kerjasama timbal-balik di bidang kebudayaan antara masyarakat kedua negara, yang kemudian terus berkembang sampai pada tingkat lembaga dan pemerintahan daerah.

Untuk memperkokoh hubungan kedua negara dalam rangka lebih memajukan hubungan kerjasama pada abad ke-21, kedua belah pihak menghharapkan dapat memainkan perannya masing-masing. Demi memenuhi berbagai tuntutan yang timbul akibat besarnya negara dan bangsa, Indonesia diharapkan dapat secepatnya mengembangkan ekonomi nasional dan memulihkan posisi diplomatiknya dalam politik internasional seperti pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.

Letak geografis yang sangat strategis yang dimiliki Indonesia telah mendorong Pemerintah Indonesia untuk berinisiatif membuka jalur laut internasional yang baru antara Selat Makasar dan Selat Lombok. Hal itu pasti akan dapat tercapai apabila kerja keras itu ditunjang oleh situasi politik nasional yang baik pada masa pemerintahan sipil di Indonesia. Di sisi lain, Korea Selatan diharapkan dapat secepatnya menuntaskan permasalahan yang berkaitan dengan hubungannya dengan Korea Utara setelah masalah nuklir Korea Utara terpecahkan. Untuk itu, Korea Selatan harus berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

Dalam hal upaya normalisasi Semenanjung Korea, Pemerintah Korea Selatan juga akan memegang peran penting di antara 4 negara besar di sekelilingnya, yaitu Cina, Jepang, Amerika Serikat, dan Rusia, karena persaingan antara Cina dan Jepang sudah mulai terlihat dalam berbagai bidang di Asia Timur. Persaingan dua negara itu diperkirakan akan berlangsung dalam waktu yang

cukup lama. Pada saat itu, Korea kiranya akan dapat berfungsi sebagai penengah dan dengan itu dapat berlaku sebagai perwakilan regional sementara di Asia Timur Jauh.

Dengan demikian, perwakilan Indonesia di Asia Tenggara dan perwakilan regional sementara Korea Selatan di Asia Timur Jauh diharapkan akan dapat bertugas, berfungsi, dan berperan dengan lebih baik lagi supaya kedua negara dapat memimpin proses globalisasi Asia Timur pada abad ke-21. Pihak Korea Selatan juga mengharapkan agar Indonesia dapat berperan dalam upaya pemulihan hubungan Korea Selatan dengan Korea Utara mengingat bahwa dalam sejarah politik modern, Indonesia mempunyai hubungan baik dengan Korea Utara di masa Gerakan Non-Blok maupun dengan Korea Selatan di masa globalisasi. Hubungan Korea Selatan-Indonesia di masa Asia Timur yang sedang berkembang maju itu pasti akan dapat menguntungkan semua pihak.

Pada abad ke-21 dapat dipastikan bahwa bidang kelautan akan memasuki babak baru. Setelah berakhirnya masa persaingan ideologi, semua negara di dunia ini sedang giat-giatnya ikut serta dalam persaingan ekonomi dan perdagangan. Hal itu berarti bahwa jasa pengangkutan “raksasa”, kapal laut yang berkapasitas besar, dan jalur pelayaran yang semakin luas akan sangat diperlukan. Pada saat itu semua negara harus membuka atau setidaknya ikut mencari potensi kelautan baru sambil mencari jalur perairan bagi kapal-kapal pengangkut yang sangat besar. Di masa itu, Indonesia dan Korea dapat memegang peran penting sambil memperbesar keuntungan bagi masing-masing negara. Indonesia sebagai negara bahari terbesar yang memiliki Selat Malaka yang saat ini sudah sangat macet dan dangkal itu pasti akan sangat memerlukan pembukaan jalur pelayaran baru. Dengan memanfaatkan jalur baru itu, Indonesia pasti akan mendapat banyak manfaat, baik di bidang ekonomi maupun politik internasional.

Dalam masa tersebut, Indonesia sangat diharapkan dapat menjalin kerja sama yang erat dengan Korea Selatan yang terkenal sebagai negara industri perkapalan di dunia, khususnya sebagai produsen kapal raksasa di dunia. Upaya Indonesia untuk membuka jalur pelayaran dan usaha Korea dalam membuat kapal yang lebih canggih lagi pasti akan sangat menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam kerjasama pada abad ke-21 (*Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century*), kedua negara pasti akan mencari cara untuk lebih mempererat hubungan yang telah terjalin dan meningkatkan keuntungan ekonomi masing-masing.

II. 1. Gambaran Umum

Penandatanganan *Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century* pada peringatan 40 tahun terbentuknya hubungan bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan merupakan momen yang tepat dan bersejarah bagi kedua negara. Karena itu, melalui deklarasi bersama tersebut kedua negara dapat berbagi kepentingan yang sama di bidang politik, ekonomi dan sosial-budaya. Deklarasi bersama ini menjadi dokumen komprehensif yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama di bidang politik, pertahanan dan keamanan serta bertujuan untuk memperdalam dan mengembangkan kerjasama di bidang lainnya seperti ekonomi, hubungan antar pemerintah ataupun hubungan antar non-pemerintah dan juga di bidang sosial-budaya.

*The Eminent Persons Group (EPG)*⁴ telah menempatkan beberapa poin penting yang harus diprioritaskan dalam pengimplementasian kesepakatan komprehensif tersebut, yakni diantaranya sebagai berikut:

- Perdagangan dan Investasi
- Kehutanan
- *Nuclear Power Plant*
- Teknologi Industri Kecil dan Menengah
- *Anti-Corruption*

⁴ *The Eminent Persons Group* atau *The Eminent Persons Group of the Republic of Indonesia and the Republic of Korea* (The EPG) merupakan sebuah institusi atau forum yang dibentuk untuk memberikan gambaran komprehensif hubungan Indonesia dengan Korea Selatan dan memberikan saran konkrit untuk memajukan hubungan kedua negara menuju kerjasama yang lebih besar seperti yang telah tertuang dalam *Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century* yang telah ditandatangani oleh kedua kepala negara pada bulan Desember 2006.

- Pertahanan dan Keamanan
- Pusat Kebudayaan (*Cultural Centers*)
- *Tourism*

Dan berdasarkan poin-poin diatas, EPG telah melahirkan 32 buah agenda penting yang menjadi fokus dalam deklarasi bersama tersebut dan juga bertujuan untuk menguatkan hubungan kerjasama kedua negara. Berikut merupakan sektor-sektor kerjasama yang secara spesifik akan dibentuk dan ditingkatkan:

A. Political and Security Cooperation

- Political Cooperation
- Anti Corruption Cooperation
- International Forum
- Regional Forum
- Defense
- Security
- Inter-Parliamentary Cooperation

B. Economic, Trade and Investment Cooperation

- Trade Liberalization
- Regional Cooperation
- Bilateral Trade
- Investment
- Infrastructure
- Energy Cooperation
- Labor Cooperation
- Development Cooperation
- Financial Cooperation
- Maritime and Fisheries Cooperation
- Forestry Cooperation
- Agricultural Cooperation
- Environment

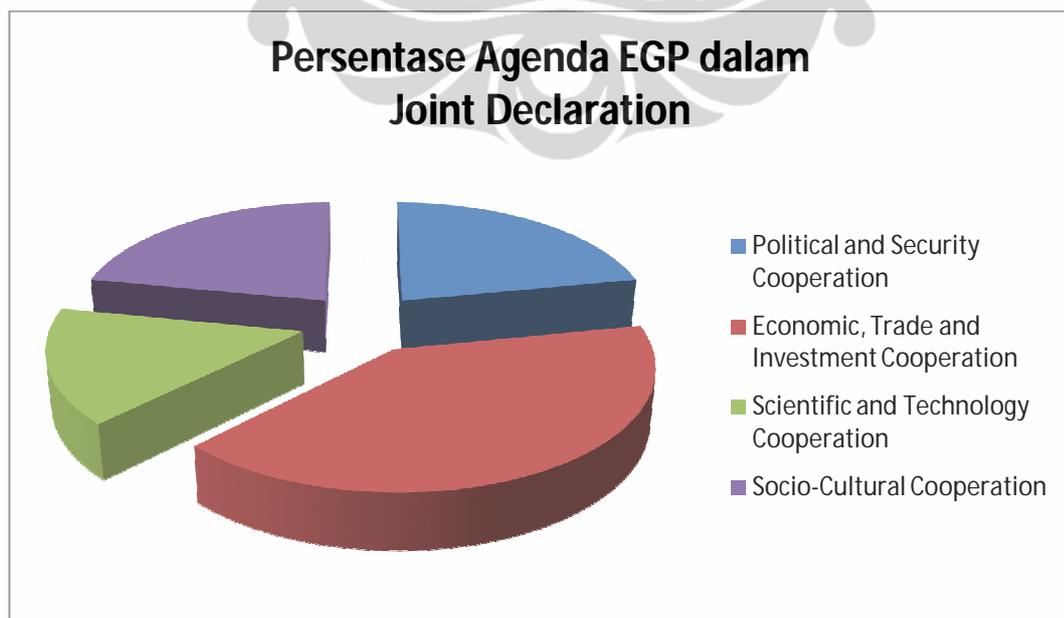
C. Scientific and Technology Cooperation

D. Socio-Cultural Cooperation

- Education
- Culture
- Youth and Sport
- Health
- Natural Disaster
- Consular and Legal Cooperation

Pembagian agenda EPG tersebut menunjukkan bahwa kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi, memiliki agenda terbanyak di antara agenda yang lainnya sejumlah 13 agenda. Diikuti oleh kerjasama politik dan keamanan yang jumlah agendanya sama dengan kerjasama bidang sosial-budaya sebanyak 7 agenda, diikuti oleh agenda kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi sebanyak 5 agenda. Bisa disimpulkan agenda kerjasama di bidang ekonomi menjadi fokus perhatian kedua negara. Lihat Grafik 2.1.

Grafik 2.1



Koordinator pelaksana kerjasama teknik Pemerintah Republik Korea dilaksanakan oleh *Korea International Cooperation Agency* (KOICA). Pemerintah Republik Korea melalui kantor Perwakilan KOICA di Indonesia melaksanakan proyek-proyek kerjasama teknik yang dilaksanakan di Indonesia dan secara berkelanjutan menawarkan program-program pendidikan dan pelatihan di Republik Korea.

Berdasarkan catatan Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri, Sekretariat Negara, selama tahun 2006,⁵ lebih dari 300 orang pejabat/pegawai dari Indonesia diberangkatkan ke Republik Korea dalam rangka mengikuti program pendidikan dan pelatihan di Republik Korea. Disamping itu, Pemerintah Republik Korea juga telah mengirimkan 18 orang tenaga ahli Korea yang ditempatkan di berbagai instansi di Indonesia. Dalam rangka program *Korea Overseas Volunteers*, tercatat 70 orang tenaga sukarela dari Korea yang setiap tahunnya dikirim ke Indonesia untuk dijadikan tenaga bantu di berbagai instansi, terutama instansi pendidikan. Untuk tahun 2007, Pemerintah Republik Korea memberikan tawaran 44 jenis pelatihan diberbagai bidang antara lain *governance, fiscal management/economic, ebergry, health and medicine dan information technology*.

Selain kegiatan-kegiatan tersebut, Pemerintah Republik Korea pada tahun 2007 telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah RI melalui berbagai kegiatan proyek antara lain:⁶

1. *Tree improvement and Modern Nursery, bekerjasama dengan Departemen Kehutanan*
2. *Construction of Korea-Indonesia Technology and Cooperation Center, bekerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja;*
3. *Project for the Establishment of a Korea-Indonesia ICT Training Center, bekerjasama dengan Departemen Komunikasi dan Informasi;*

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Perkembangan Kerjasama Teknik RI-Republik Korea* dalam http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=11&Itemid=41 diakses pada tanggal 26 November 2010 pukul 23:16 wib.

⁶ *Ibid.*

4. *Establishment of School of Environment Conservation and Ecotourism Management, bekerjasama dengan Departemen Kehutanan;*
5. *Feasibility Study on the Improvement of Electricity Distribution System in Semarang, Surabaya and Jakarta, bekerjasama dengan PT. PLN (Persero) dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;*
6. *Establishment of Model-Indonesia Friendship Hospital;*
7. *Rehabilitation of Mangrove Forest and Coastal Area Damaged by Tsunami*
8. *Tsunami Reconstruction and Rehabilitation.*

Pemerintah Indonesia juga memberikan kesempatan bagi Pemerintah Republik Korea untuk mengikuti Program Darmasiswa yang dikoordinasikan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Program Darmasiswa adalah program pendidikan non-gelar untuk mempelajari bahasa, budaya, musik dan kerajinan tangan di Indonesia. 2 (dua) orang dari Republik Korea telah mengikuti program darmasiswa tahun 2006, sedangkan untuk tahun ajaran 2007/2008 terdapat 5 orang peserta program darmasiswa.

Sebagai salah satu tindak lanjut *Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century* tersebut di atas, pada tanggal 4 April 2007, Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kepala Biro KTLN, Sekretariat Negara dan Pemerintah Republik Korea diwakili oleh Kepala Kantor KOICA Indonesia telah menandatangani *Record of Discussions (ROD) between the Implementation Survey Team of the Republic of Korea and State Secretariat of the Republic of Indonesia on the Capacity Building for Public Officials for Government Innovation in Indonesia*.

Dalam kesepakatan yang tercantum pada ROD tersebut, Pemerintah Republik Korea memberikan hibah sebesar US\$ 650,000 untuk memberikan pelatihan dalam bidang *Good Governance* bagi 100 orang pegawai/pejabat pemerintahan Indonesia dan penugasan 4 orang tenaga ahli (*experts*) dalam jangka waktu pendek (1-4 minggu) dari Republik Korea selama tahun 2007-2009. ROD

juga menyepakati bahwa Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menyelenggarakan Lokakarya yang diikuti oleh alumni-alumni pelatihan dan *expert* dari Indonesia dan Republik Korea sebagai tindak lanjut dari pelatihan tersebut. Peserta pelatihan direncanakan berasal dari 7 instansi pemerintah antara lain: Sekretariat Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Lembaga Administrasi Negara, Kejaksaan Agung, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Keuangan.

II. 2. Agenda Spesifik di Bidang Pertahanan

Dalam poin yang disebutkan dalam *Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century* di bidang pertahanan, kedua negara memiliki agenda yang hendak diwujudkan, yaitu:⁷

- 1) *To hold periodic RI-ROK defense policy talks at the senior official's level for discussion on various areas of defense cooperation between the two countries.*
- 2) *To further increase contacts and exchanges of visits between respective defense official the two countries.*
- 3) *To intensify exchanges in education, training and on-the-job participation between two countries.*
- 4) *To promote and facilitate joint production, high-technology transfer, and other schemes of cooperation between their respective defense industries as well as counter-purchase and joint marketing, and to further advance specific defense industrial cooperation through the Joint Defense Logistics and Industrial Committee (JDLIC).*

Peningkatan keamanan maritim (*maritime security*) yang dilakukan untuk melawan ancaman seperti terorisme dan pembajakan menjadi isu penting bersamaan dengan semakin meningkatnya kemunculan berbagai bentuk ancaman

⁷ Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century.

keamanan non-tradisional. The EPG merekomendasikan Indonesia dan Korea Selatan untuk lebih mendiskusikan kerjasama dalam pengamanan Selat Malaka, yang menjadi rute utama bagi kapal-kapal pengiriman produk perdagangan kedua negara. Dan dengan kondisi laut antara Kalimantan dan Sulawesi yang sangat terbuka berpotensi sebagai jalur masuk yang mudah bagi teroris, sehingga EPG memandang diperlukannya pembentukan sebuah kerjasama yang saling menguntungkan (*mutual cooperation*) bagi kedua belah pihak dalam mengamankan wilayah laut tersebut.

Bidang penting lainnya yang menjadi pembahasan dalam kerjasama politik dan keamanan adalah pertahanan. Semenjak Indonesia dan Korea Selatan menandatangani perjanjian kerjasama bilateral di bidang pertahanan pada tahun 1990, kedua negara telah menjalin hubungan dekat yang kooperatif di bidang pertahanan negara.

Pertemuan *The Joint Defense Logistic and Industry Committee* (JDLIC) tingkat ke-13 yang dilakukan pada bulan Agustus 2006 telah memberikan kontribusi dalam perluasan kerjasama pertahanan Indonesia dengan Korea Selatan. Selain itu terjalin pula pemeliharaan forum komunikasi yang baik antara Angkatan Laut kedua negara (*Navy-to-Navy Talks*) yang membuat hubungan Indonesia dengan Korea Selatan di bidang pertahanan sangat baik. Kedua negara telah menjalankan forum militer bilateral yang baik: forum bilateral antara Angkatan Laut kedua negara telah dilakukan sejak tahun 1996, sedangkan forum bilateral Angkatan Udara kedua negara telah dilakukan sejak tahun 2004 dan forum bilateral Angkatan Darat kedua negara telah dilakukan sejak tahun 2006. EPG merekomendasikan bagi Indonesia dan Korea Selatan untuk terus melanjutkan diadakannya forum-forum bilateral seperti diatas (Angkatan Laut, Udara dan Darat) yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama pertahanan di masa depan.

Dalam *Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century*, lebih memfokuskan pada pentingnya saling mempromosikan dan saling memfasilitasi kerjasama produksi, transfer teknologi

dan skema kerjasama lainnya di bidang pembayaran (*counter-purchase*) dan juga pemasaran produk pertahanan kedua negara. Dalam deklarasi bersama tersebut juga merekomendasikan kerjasama industri pertahanan yang lebih jauh dan mendalam antara Indonesia dengan Korea Selatan melalui JDLIC. Dengan kata lain EPG menyarankan JDLIC untuk mempersiapkan rencana jangka panjang untuk kerjasama di bidang industri pertahanan yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Kedua negara.

EPG juga menganggap perlu adanya pengembangan program pertukaran pejabat militer Indonesia dan Korea Selatan dengan tujuan untuk memperluas kerjasama di bidang pertahanan pada tingkat yang lebih tinggi yaitu pada tingkat pembuatan kebijakan (*policy making*). Program pertukaran kadet Angkatan Darat, Laut dan Udara antara kedua negara telah dilakukan lebih dari 25 tahun. Namun, untuk beberapa tahun terakhir, program ini tidak dilakukan secara teratur dikarenakan oleh tidak adanya pengiriman kadet dari Indonesia ke Korea Selatan. Program pertukaran ini sangat penting dan menjadi salah satu upaya penting untuk mempertahankan dan mengembangkan kerjasama pertahanan kedua negara. Oleh karena itu, EPG mengharapkan adanya revitalisasi program pertukaran kadet tersebut dan program tersebut seharusnya diperluas dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan bagi staf komandan dan jenderal.

Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi kerjasama antara Departemen Pertahanan dengan *The Ministry of National Defense* (MND) berupa pertemuan tetap rutin dilaksanakan setiap tahun dengan penyelenggaraan secara bergantian, antara lain:⁸

- a. *Joint Committee Meeting*, antara Dephan RI dengan mitra Dephan ROK.
- b. *Intelligence Exchange*, antara Bais TNI dengan *Korea Defense Intelligence Agency*.
- c. *Army to Army Talks*, antara TNI AD dengan *ROK Army*.
- d. *Navy to Navy Talks*, antara TNI AL dengan *ROK Navy*.
- e. *Airmen to Airmen Talks*, antara TNI AU dengan *ROKAF*.

⁸<http://www.deplu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=BilateralCooperation&IDP=68&P=Bilateral&l=id> diakses pada tanggal 30 November 2010 pukul 18:24 wib.

- f. *Intelligence Meeting* , antara BIN dengan *Korea National Intelligence Service* (KNIS).
- g. Program pendidikan dan latihan antara kedua negara.
- h. Program seminar dan pameran.
- i. Program kerjasama bidang industri pertahanan.

